

Perekonomian Indonesia pada masa Pandemi *Covid-19*

Yusi Yusianto

Pendahuluan

Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia (Republik Indonesia, 2020), Joko Widodo, mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka perepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*. PP tersebut membatasi kegiatan penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Covid-19* sebagai upaya untuk mencegah penyebaran ke wilayah atau penduduk lainnya. Dalam PP tersebut, PSBB minimal meliputi, antara lain, peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Meskipun PP tersebut dikeluarkan pada akhir bulan Maret 2020, sesungguhnya, praktik PSBB secara informal (dengan menggunakan berbagai nama) mulai dilakukan di berbagai daerah di Indonesia sejak awal bulan Maret 2020. Hal tersebut dilakukan oleh kepala daerah – kepala daerah tersebut ketika penduduk di wilayahnya sudah ada yang terkena *Covid-19*. Dampak dari pemberlakuan kebijakan tersebut langsung menghentikan sebagian besar aktivitas ekonomi penduduknya.

Dalam ilmu ekonomi, aktivitas ekonomi masyarakat dapat dilihat melalui data pertumbuhan ekonomi. Secara teknis, pertumbuhan ekonomi merupakan persentase perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu tahun atau periode terhadap PDB tahun atau periode sebelumnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi sangat erat kaitannya dengan PDB. Menurut definisinya, PDB adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam satu periode atau tahun (Parkin, 2016). Mengacu pada definisi standar tersebut, maka dapat diduga bahwa kebijakan PSBB tersebut akan berdampak pada PDB dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan melambat, bahkan mungkin mengalami pertumbuhan yang negatif. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dapat menjadi negatif terjadi apabila nilai PDB tahun 2020 lebih rendah daripada nilai PDB tahun 2019. Tulisan ini akan melihat perkembangan PDB Indonesia pada tahun 2020.

Perkembangan Ekonomi Indonesia

Sebelum membahas perekonomian Indonesia pada tahun 2020, tulisan ini akan membahas perekonomian Indonesia sebelum tahun 2020 (Tabel I).

Tabel 1
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Tahun 2000 – 2019

No	Keterangan	2000	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pendapatan Nasional (perubahan %)											
1	PDB riil	4.9	6.2	6.0	5.6	5.0	4.9	5.0	5.1	5.2	5.0
2	Investasi riil	11.4	8.9	9.1	5.0	4.4	5.0	4.5	6.2	6.6	4.4
3	Konsumsi riil	4.6	5.1	5.4	5.7	4.7	4.9	4.3	4.6	5.1	4.9
	a. Swasta	3.7	5.1	5.5	5.5	5.3	4.8	5.0	5.0	5.1	5.2
	b. Pemerintah	14.2	5.5	4.5	6.7	1.2	5.3	(0.1)	2.1	4.8	3.2
4	Ekspor riil	30.6	14.8	1.6	4.2	1.1	(2.1)	(1.7)	8.9	6.5	(0.9)
5	Impor riil	26.6	15.0	8.0	1.9	2.1	(6.2)	(2.4)	8.1	11.9	(7.7)
6	Rasio Investasi thd PDB (%)	19.9	31.3	32.7	32.5	32.4	32.4	32.2	32.6	33.0	32.8
7	PDB nominal (USD miliar)	165	893	918	915	891	861	932	1,016	1,042	1,119
8	PDB per kapita (USD)	857	3,688	3,741	3,688	3,532	3,368	3,605	3,886	3,945	4,193

Sumber: World Bank (2020).

Tabel I menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi mulai melambat sejak tahun 2012. Setelah tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah di bawah 6%. Bahkan, pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sempat menyentuh angka 4,9%, kemudian naik sedikit ke angka 5%. Secara umum, pertumbuhan ekonomi periode 2015-2019 berkisar di sekitar angka 5%. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut tampaknya sejalan dengan perlambatan pertumbuhan investasi sejak tahun 2013. Pertumbuhan investasi sempat sedikit meningkat pada tahun 2017 dan 2018, namun turun kembali pada tahun 2019. Meskipun pertumbuhan investasi cenderung menurun sejak tahun 2013, namun rasio investasi terhadap PDB cenderung meningkat. Pada tahun 2000, rasio investasi terhadap PDB adalah 19,9%, sejak tahun 2011, rasionya cenderung meningkat tinggi, yang berkisar antara 31% hingga 33%. Apabila rasio investasi tersebut dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi, maka akan diperoleh angka perkiraan *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)*. Angka ICOR Indonesia diperkirakan meningkat dan di atas 6 sejak tahun 2014. Setidaknya, terdapat dua interpretasi atas angka ICOR yang tinggi tersebut. Pertama, menunjukkan penurunan efisiensi perekonomian. Kedua, alokasi investasi pada sektor-sektor ekonomi yang cenderung memberi hasil di atas jangka pendek.

Konsumsi ternyata juga menunjukkan perlambatan pertumbuhan setelah tahun 2013. Pada umumnya pertumbuhan konsumsi swasta lebih tinggi daripada konsumsi pemerintah. Hanya pada tahun 2000, 2011, 2013 dan 2015, pertumbuhan konsumsi riil pemerintah lebih tinggi daripada konsumsi riil swasta. Berbeda dari pola pertumbuhan konsumsi swasta, pertumbuhan konsumsi pemerintah tidak memiliki pola yang jelas. Setiap kali pertumbuhan konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan yang relatif tinggi, selalu disertai perlambatan pertumbuhan yang cukup tajam pada tahun berikutnya.

Gambaran lebih parah lagi terlihat pada pertumbuhan ekspor yang cenderung melambat setelah tahun 2011. Hal tersebut ternyata diikuti oleh perlambatan pertumbuhan impor juga. Ekspor dan impor mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2015, 2016, dan 2019. Hal ini menunjukkan bahwa perlambatan permintaan tidak hanya berasal dari dalam negeri namun juga luar negeri.

Tampaknya, perlambatan pertumbuhan aktivitas ekonomi tersebut apabila dilihat dari faktor eksternal tampaknya terkait dengan resesi dunia yang belum pulih akibat dari krisis keuangan global pada tahun 2008 – 2009. Dalam masa transisi dari resesi ke pemulihan ekonomi dunia tampaknya mulai diganggu lagi dengan masalah yang timbul dari ancaman perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Bahkan, sampai akhir tahun 2019, hubungan kedua negara besar dalam ekonomi tersebut masih belum pulih. Akhirnya, memasuki awal tahun 2020, dunia dihantam oleh penyebaran covid-19. Dampaknya pada perekonomian Indonesia dapat dilihat pada tabel 2 dan tabel 3.

Tabel 2
Pertumbuhan, Sumber Pertumbuhan dan Inflasi menurut Lapangan Usaha (%)

No	Lapangan Usaha	Pertumbuhan Ekonomi (%)		Distribusi Persentase PDB		Sumber Pertumbuhan		Inflasi (%)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	3.60	1.75	12.37	12.85	0.45	0.22	2.22	3.28
2	Pertambangan & Penggalian	1.22	(1.95)	7.36	7.37	0.09	(0.14)	(5.25)	(11.89)
3	Industri Pengolahan	3.80	(2.93)	20.79	20.61	0.80	(0.61)	1.97	1.32
4	Pengadaan Listrik & Gas	4.11	(2.42)	1.02	1.01	0.04	(0.02)	0.68	(0.51)
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	7.14	5.56	0.08	0.09	0.01	0.00	(0.13)	0.05
6	Konstruksi	5.75	(3.26)	10.12	10.00	0.58	(0.33)	3.00	0.39
7	Perdagangan; Reparasi	4.60	(3.72)	13.15	12.93	0.61	(0.49)	1.96	0.59
8	Transportasi & Pergudangan	6.41	(15.05)	4.23	3.67	0.27	(0.64)	3.85	(7.91)
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	5.78	(10.20)	3.04	2.79	0.17	(0.31)	0.84	(0.28)
10	Informasi & Komunikasi	9.41	10.59	5.38	6.08	0.49	0.57	2.45	0.43
11	Jasa keuangan dan Asuransi	6.62	3.25	4.05	4.27	0.26	0.13	2.18	0.42
12	Real Estate	5.77	2.34	2.89	3.02	0.17	0.07	2.34	0.90
13	Jasa Lainnya	7.37	0.33	11.38	11.66	0.82	0.04	2.07	2.09
	Nilai Tambah Bruto atas Dasar Harga Dasar	4.96	(1.58)	95.89	96.36	4.76	(1.52)	1.60	(0.46)
	Pajak dikurang Subsidi atas Produk	6.43	(13.42)	4.11	3.64	0.26	(0.55)	1.62	(0.45)
	Produk Domestik Bruto	5.02	(2.07)	100.00	100.00	5.02	(2.07)	1.60	(0.46)

Sumber: Diolah dari data BPS (2020a, 2020b, 2020c, 2020d) (<http://www.bps.go.id>)

Tabel 2 menggambarkan bahwa perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif, yakni – 2,07%. Banyak lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif, antara lain, Pertambangan & Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik & Gas; Konstruksi; Perdagangan; transportasi; dan Penyediaan Akomodasi & Makan Minum. Lapangan usaha – lapangan usaha tersebut memberi kontribusi sekitar 58,39% dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Dari data sumber pertumbuhan, ketujuh lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif tersebut membuat pertumbuhan ekonomi menjadi – 2,54%, sedangkan pertumbuhan lapangan usaha lainnya (di luar ketujuh lapangan usaha tersebut) adalah 0,47%.

Tabel 2 juga menampilkan data inflasi lapangan usaha yang diperoleh dari perubahan deflator PDB. Data tersebut menunjukkan bahwa Pertambangan & Penggalian mengalami deflasi yang besar, yakni – 11,89%. Deflasi tersebut juga sudah terjadi pada tahun 2019. Selain Pertambangan & Penggalian, Transportasi dan Penyediaan Akomodasi juga mengalami deflasi pada tahun 2020. Secara total, perekonomian mengalami deflasi sekitar 0,46%.

Tabel 3
Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan menurut Pengeluaran (%)

No	Pengeluaran	Pertumbuhan Ekonomi (%)		Distribusi Persentase PDB		Sumber Pertumbuhan	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
		1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5.04	(2.63)	54.2	53.9
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	10.57	(4.26)	1.2	1.2	0.12	(0.05)
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3.26	1.95	7.8	8.1	0.26	0.15
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.45	(4.95)	32.9	31.9	1.47	(1.63)
5	Perubahan Inventori	(34.14)	(60.54)	1.2	0.5	(0.65)	(0.72)
6	Ekspor Barang dan Jasa	(0.86)	(7.71)	20.7	19.5	(0.19)	(1.60)
7	Impor Barang dan Jasa	(7.39)	(14.71)	18.6	16.2	(1.56)	(2.74)
	Diskrepansi Statistik*	(31.73)	74.81	0.6	1.1	(0.30)	0.46
	Produk Domestik Bruto (PDB)	5.02	(2.07)	100.0	100.0	5.02	(2.07)

Sumber: Diolah dari data BPS (2020a, 2020b, 2020c, 2020d) (<http://www.bps.go.id>)

Tabel 3 menggambarkan pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran. Hampir semua pengeluaran, kecuali Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, mengalami pertumbuhan negatif. Pengeluaran Konsumsi terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT). Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan kontributor terbesar bagi PDB, yakni sekitar 53,9%. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga sekitar – 2,63% membuat pertumbuhan ekonomi menjadi – 1,43%. Demikian juga dengan investasi, yang menggunakan data pembentukan modal tetap bruto, yang memberi kontribusi cukup besar bagi PDB. Pertumbuhan investasi sekitar – 4,95% membuat pertumbuhan ekonomi menjadi – 1,63%. Secara umum, pertumbuhan yang berasal dari penyerapan domestik (*domestic absorption*), yang merupakan penjumlahan pengeluaran konsumsi, pengeluaran pemerintah dan investasi adalah sekitar – 3,67%.

Tabel 3 juga memberi gambaran mengenai peranan pengeluaran eksternal terhadap PDB, yang tercermin pada data ekspor dan impor. Ekspor dan impor mengalami pertumbuhan negatif sejak tahun 2019. Pertumbuhan negatif tersebut semakin besar pada tahun 2020. Pertumbuhan ekspor yang negatif ini dapat saja diinterpretasikan sebagai penurunan daya saing, namun dalam situasi global yang terjadi saat ini dapat juga diinterpretasikan sebagai penurunan permintaan luar negeri atas produk-produk domestik akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Pertumbuhan impor yang negatif tampaknya menunjukkan penurunan daya beli domestik atas

barang impor. Pertumbuhan ekspor sekitar $-7,71\%$ membuat pertumbuhan ekonomi menjadi $-1,60\%$. Di lain pihak, pertumbuhan impor sekitar $-14,71\%$ membuat pertumbuhan ekonomi menjadi $2,74\%$. Dengan demikian, pertumbuhan ekspor neto (ekspor dikurang impor) membuat pertumbuhan ekonomi menjadi sekitar $1,14\%$.

Apakah Indonesia sudah Mengalami Resesi?

Apakah yang dimaksud dengan resesi? Resesi merupakan kondisi dalam suatu siklus bisnis (*business cycle*). Menurut Burns dan Mitchell (Moore, 1967), siklus bisnis merupakan fluktuasi aktivitas ekonomi agregat. Suatu buku teks pengantar ilmu ekonomi (Parkin, 2016) mendefinisikan resesi sebagai penurunan PDB riil atau pertumbuhan negatif dalam suatu periode, minimal dua triwulanan berturut-turut. Menariknya, masih dalam buku yang sama, dalam gambar 21.6, yang menggambarkan siklus bisnis Amerika Serikat dari tahun 2004 hingga tahun 2014, resesi terjadi dari tahun 2008 hingga pertengahan 2009. Pada keadaan resesi tersebut, pertumbuhan ekonominya masih positif, belum negatif.

Kembali pada definisi yang dikemukakan Parkin di atas. Definisi tersebut berasal dari *National Bureau of Economic Research* (NBER), lembaga penelitian ekonomi independen di Amerika Serikat (Parkin, 2016; Keybridge Research, 2008). NBER (Parkin, 2016; Keybridge Research, 2008; NZIER, 2019) mendefinisikan resesi sebagai suatu periode penurunan PDB riil, pendapatan, tenaga kerja, produksi industri dan perdagangan secara signifikan, yang biasanya berlangsung dari enam bulan hingga satu tahun, dan ditandai oleh kontraksi pada banyak sektor ekonomi.

Sebagai informasi (Keybridge Research, 2008), kondisi resesi di Amerika Serikat dinyatakan secara resmi oleh suatu komite yang terdiri dari tujuh profesor ekonomi pada komite *Business Cycle* di NBER. Komite melihat resesi dalam waktu bulanan, bukan triwulanan. Komite pakar tersebut memperhatikan data empat *series* publikasi bulanan untuk menentukan apakah terjadi resesi atau tidak. Data PDB riil dipublikasi dalam triwulanan, sedangkan data lainnya dipublikasi dalam bulanan. Komite mungkin saja mengumumkan negara dalam kondisi resesi apabila menyimpulkan bahwa terjadi penurunan yang signifikan dalam indikator bulannya, meskipun indikator triwulan PDB masih menunjukkan tanda positif. NBER (Danziger, 2013)

menamakan resesi dari bulan Desember 2007 hingga Juni 2009 sebagai resesi besar (*great recession*) karena resesi tersebut dianggap resesi terparah sejak depresi besar (*great depression*) pada tahun 1930-an.

Berdasarkan pada uraian di atas, tampaknya banyak negara mengacu pada definisi yang dibuat oleh NBER dalam menetapkan suatu resesi bagi negaranya. Pemerintah Indonesia menyatakan secara resmi bahwa ekonomi Indonesia mengalami resesi pada saat BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal III tahun 2020, sekitar -3,49% (Fauzia, 2020).

Namun, dalam implementasinya, keputusan negara seperti Amerika Serikat menetapkan bahwa terjadi kondisi resesi tidak dipegang secara mutlak. Komite atau tim yang menetapkan kondisi resesi dimungkinkan untuk menyatakan resesi dengan pertimbangan lain di luar ketentuan pertumbuhan ekonomi harus negatif dalam dua triwulan. Selain itu, penilaian kondisi resesi juga tidak harus diputuskan dalam triwulanan sesuai publikasi data PDB. Mereka dapat memutuskan dalam hitungan bulanan apabila disimpulkan bahwa perekonomian mengalami penurunan aktivitas yang signifikan dalam kurun empat bulan berturut-turut. Terakhir, penentu bahwa suatu perekonomian mengalami resesi dilakukan oleh pihak independen, bukan pemerintah. Hal terakhir ini lah yang memungkinkan komite atau tim penilai tersebut lebih mudah mengambil keputusan karena tidak memiliki kepentingan pribadi. Apabila pihak pemerintah yang menetapkan, maka mungkin saja terjadi konflik kepentingan karena kekhawatiran bahwa dirinya dianggap gagal mengelola perekonomian.

Keengganan untuk menyatakan bahwa kondisi sudah resesi, padahal kondisinya sudah resesi dan masyarakat juga sudah merasakan dampak resesi, maka akan menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi masyarakat mengenai kondisi ekonominya. Kebijakan pemerintah menjadi kontradiktif. Di satu sisi menyatakan belum resesi, namun kebijakan yang dilakukan merupakan kebijakan yang biasa dilakukan dalam kondisi resesi. Ketidakjelasan kondisi yang dihadapi bukan hanya dihadapi oleh masyarakatnya, namun juga dapat dihadapi oleh aparat pemerintah juga. Pada gilirannya, perilaku masyarakat dan aparat pemerintah juga menjadi tidak jelas sehingga sikapnya menjadi tidak sesuai dengan keadaan resesi. Tidak ada komitmen dan kesadaran bersama untuk mengatasi resesi. Hal tersebut dapat dilihat dari tulisan Sparrow, Dartanto & Hartwig (2020). Pengumuman Presiden Joko Widodo yang menyatakan

bahwa Indonesia akan masuk pada kondisi normal baru (*new normal*) tidak didukung dengan langkah strategi yang jelas. Kebijakan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada bulan Juni untuk mendorong pemulihan ekonomi diterapkan pada kondisi yang masih belum mampu mengendalikan penyebaran Covid-19. Selain itu, kebijakan kesehatan publik masih fokus pada mengatasi penyebaran virus yang bersifat jangka pendek daripada menurunkan tingkat penyebaran virus. Ketika banyak negara di Asia dan Eropa Barat memberlakukan kebijakan yang lebih ketat untuk menghindari gelombang kedua Covid-19, Indonesia masih fokus pada gelombang pertama.

Data-data atau indikator ekonomi yang sebenarnya menunjukkan resesi apabila semakin diabaikan, maka akan membuat indikator tersebut semakin lama, semakin tidak dilihat sebagai peringatan dini. Ketika peringatan dini tersebut terus diabaikan, maka kebijakannya belum tentu tepat karena keputusannya tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Padahal masa ini istilah *big data* semakin mencuat, namun keengganan menggunakan data yang benar dan realistis, akan membawa pada perencanaan yang tidak realistis juga.

Secara menarik, Samuelson (2011) memberi komentar mengenai respons pemerintah atau regulator terhadap resesi. Menurutnya, masalahnya bukan pada tidak ada regulasinya, melainkan bahwa regulator belum tentu lebih paham daripada yang mau diatur. Mungkin ini yang perlu disadari oleh pemerintah agar kebijakannya tidak membawa keadaan yang lebih buruk dan tidak membingungkan serta melunturkan kepercayaan masyarakat. Pernyataan Samuelson tersebut relevan dengan kondisi yang terjadi pada tahun 2020, yakni masa pandemi Covid-19. Sejak pemerintah memberlakukan

Penutup

Pada hakekatnya data perekonomian Indonesia sudah menunjukkan kondisi resesi. Namun, pemerintah Indonesia, sebagaimana pemerintah negara lainnya, tampaknya bukan hanya mempertimbangkan sisi ekonomi namun juga sisi sosial politiknya. Hal tersebut dapat dipahami. Namun, tidak dapat dibenarkan dari segi perencanaan ekonomi. Data yang diharapkan sebagai indikator untuk menilai kondisi ekonomi yang sebenarnya, menjadi menurun perannya sebagai suatu peringatan dini atas kemungkinan kejadian yang lebih buruk di masa yang akan datang.

Keteledoran yang disengaja ini akan mengurangi kewaspadaan pengelola negara dalam mengantisipasi masalah yang lebih besar pada masa yang akan datang.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi sudah berlangsung beberapa tahun sebelum tahun 2020, yakni sekitar 2013. Pengumuman pemerintah yang baru mengumumkan resesi pada kuartal III tahun 2020 dapat dikatakan terlambat terutama apabila tujuan dari pengumuman tersebut sebagai tanda atau *signal* peringatan dini resesi. Apabila pengumuman tersebut tidak ditujukan sebagai tanda peringatan dini, maka pengumuman pemerintah tersebut tidak memberi arti apa-apa bagi pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi sudah merasakan suasana resesi sejak pemerintah memberlakukan kebijakan PSBB, yang dengan sendirinya membatasi atau mengurangi aktivitas pelaku ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap pelaku usaha mengenai dampak Covid-19 (BPS,2020). Survei tersebut dilaksanakan pada tanggal 10-26 Juli 2020 dengan jumlah responden 34.559, yang mencakup semua lapangan usaha di luar pemerintahan, aktivitas rumah tangga pemberi kerja dan badan internasional. Pemberlakuan PSBB di beberapa wilayah membuat hanya 59,44% perusahaan yang masih beroperasi seperti biasa; 8,76% berhenti beroperasi; dan 31,8% yang beroperasi dengan pengurangan kapasitas serta menerapkan program WHF (*work from home*). Dalam menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan berapa lama perusahaan dapat bertahan di masa pandemi ini, 55,32% menjawab tidak tahu, 25,94% menjawab lebih dari 3 bulan, 14,58% menjawab antara 1 – 3 bulan; dan 4,17% menjawab kurang dari 1 bulan.

Berdasarkan pembahasan di atas, perekonomian sudah beberapa tahun sebelumnya mengalami perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi dan, pada akhirnya, menerima dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Untuk itu, pemerintah mendapat tantangan untuk membuat kriteria mengenai tingkatan resesi dari yang paling ringan sampai yang terberat agar pengumuman pemerintah mengenai kondisi perekonomian yang mengalami resesi dapat dijadikan indikator, tanda dan peringatan bagi pelaku usaha. Hal tersebut juga sesuai dengan konsep resesi yang merupakan suatu proses dalam suatu siklus bisnis suatu perekonomian.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2020a). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I – 2000. *Berita Resmi Statistik* No.39/05/Th. XXIII, 5 Mei 2020
- Badan Pusat Statistik. (2020b). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II – 2000. *Berita Resmi Statistik* No.64/08/Th. XXIII, 5 Agustus 2020
- Badan Pusat Statistik. (2020c). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III – 2000. *Berita Resmi Statistik* No.85/11/Th. XXIII, 5 November 2020
- Badan Pusat Statistik. (2020d). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV – 2000. *Berita Resmi Statistik* No.13/02/Th. XXIV, 5 Februari 2021
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 terhadap Pelaku Usaha*. Jakarta: BPS.
- Danziger, S. (2013). Introduction: Evaluating the Effects of the Great Recession. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*. November. Vol. 650.
- Fauzia, Mutia .(2020). “Indonesia resmi Resesi, Ekonomi kuartal III-2020,minus 3,49 persen”. Kompas.com.05/11/2020.
(<https://money.kompas.com/read/2020/11/05/111828826/indonesia-resmi-resesi-ekonomi-kuartal-iii-2020-minus-349-persen>)
- Keybridge Research. (2008). The Definition of “Resarch”. *Key Insights*. December.
- Moore, G.H., (1967). What is a Recession? *The American Statistician*. Oct. vol. 21. No. 4.
- New Zealand Institute of Economic Research (NZIER). (2019). Recession: what are the chances? *NZIER Insight 83/2019*.
- Parkin, Michael, (2016). *Economics*. Essex: Pearson
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- Samuelson, R.J. (2011). Rethinking the Great Recession. *The Wilson Quarterly*. Winter.

- Sparrow, R., Dartanto, T., & Hartwig, R., (2020). "Indonesia under the New Normal: Challenges and the Way Ahead". *Bulletin of Indonesia Economic Studies*. Vol. 56, No. 3. December.
- World Bank. (2020). *Indonesia Economic Prospects: The Long Road to Recovery*. July